



Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Di Sekolah Menengah Atas Di Kota Surabaya

Yenik Pujowati¹, Putu Ari Saruhum Hasibuan², Suchahyo Tri Budiono³

¹Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

²Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

³Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

yenikpujo@uwks.ac.id

Article History:

Received: 20 Desember 2023

Revised: 28 Desember 2023

Accepted: 22 Januari 2024

Keywords:

Anti-Corruption Education (PKn)
Character of the Nation.

Abstrac. The purpose of this Community Service aims to provide and convey the basic ideas of the theoretical conceptual framework and the Implementation of Anti-Corruption Education through the learning of Citizenship Education (PKn) as a strengthening of the nation's character in Senior High Schools. The main target of anti-corruption education is to introduce the phenomenon of corruption which includes criteria, causes and consequences, increase intolerance towards acts of corruption, demonstrate various possible efforts to fight corruption and contribute to previously set standards such as realizing values and capacities to oppose corruption among generations. young. Besides that, students are also brought to analyze standard values that contribute to corruption and values that reject or disagree with acts of corruption. Therefore, anti-corruption education is basically the planting and strengthening of basic values that are expected to be able to shape anti-corruption attitudes in students. Efforts to prevent corruption can be instilled from an early age, when children are still in elementary school, middle school or high school. The method of this activity is in the form of assistance in the implementation of Anti-Corruption education through Citizenship Education (PKn) in Senior High Schools

Abstrak. Tujuan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan dan menyampaikan ide-ide dasar kerangka konseptual teoritis dan Implementatif Pendidikan Antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai penguat karakter bangsa di Sekolah Menengah Atas. Target utama Pendidikan antikorupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda. Disamping itu siswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik. Upaya pencegahan korupsi dapat ditanamkan sejak dini, sejak anak masih duduk di bangku SD, SMP, maupun SMA. Metode kegiatan ini berupa pendampingan Implementasi pendidikan Antikorupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Menengah Atas

Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi, (PKn) Karakter Bangsa.

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki misi yang sangat mulia, Misi tersebut tentu menjadi salah satu tujuan bagaimana mata pelajaran PPKn bisa menjadi tolak ukur

Received November 20, 2023; Revised Desember 28, 2023; Januari 2, 2024

*Corresponding author, yenikpujo@uwks.ac.id

Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Di Sekolah Menengah Atas Di Kota Surabaya

dalam pengimplementasian nilai-nilai antikorupsi pada peserta didik sebagai salah satu dari pendidikan nilai yang perlu dikembangkan. Menurut (Sutrisno:2017) Korupsi berkembang dengan sangat pesat dan meluas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tentu diperlukan upaya yang efektif dalam menyelesaikan korupsi di Indonesia. Upaya pengenalan tentang budaya antikorupsi haruslah dilakukan sejak dini. Salah satunya melalui dunia pendidikan, baik sekolah SD, SMP maupun di sekolah menengah atas (SMA). Menurut (Harmanto:2012) Antikorupsi dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah, Namun tidak berdiri sendiri sebagai salah satu mata pelajaran. Pendidikan antikorupsi dapat di integrasikan dalam berbagai mata pelajaran yang sudah ada sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap, dan perilaku siswa. Untuk maksud tersebut dukungan kultur dan iklim sekolah sangat dibutuhkan terutama dalam konteks penanaman nilai dan pembentukan karakter siswa. Salah satu mata pelajaran yang dapat mengintegrasikan pendidikan antikorupsi adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi sangat strategis di tengah upaya pemerintah dalam membangun karakter bangsa mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Adanya Pendidikan Antikorupsi dalam pembelajaran PKn diharapkan mampu memberikan bekal awal tentang pengetahuan, pemahaman, dan akibat korupsi, sikap dan perilaku antikorupsi yang selalu terkonstruksi dalam diri siswa. Salah satu upaya mencegah korupsi dan mengembangkan sikap antikorupsi melalui sekolah telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009. Menurut (Lili Halimah, dkk : 2021) Penanaman nilai-nilai luhur dapat diperkenalkan sejak dini melalui penyisipan nilai-nilai luhur yang membentuk karakter anti korupsi yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, mandiri, sederhana, adil dan peduli dalam beberapa mata pelajaran yang sudah ada. Nilai kejujuran penting untuk diajarkan untuk mengkurangi dekadensi moral. Penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan antikorupsi pada akhirnya mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai definisi korupsi, jenis korupsi, dampak buruk korupsi dan upaya yang dapat dilakukan untuk berperan serta dalam memberantas korupsi. Melalui sosialisasi yang diharapkan terjadi perubahan sikap siswa sekolah menengah dari sikap membiarkan, memahami, dan memaafkan korupsi ke sikap menolak korupsi. Berdasarkan (Budimansyah:2008) Model pembelajaran PPKn pada Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional di Indonesia diharapkan dapat berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai sikap antikorupsi dengan baik bagi para siswa sekolah menengah atas dalam memahami korupsi.

Fenomena yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran tentang korupsi yang dilaksanakan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) belum sesuai dengan sasaran yang dikehendaki, terutama menyangkut penanaman sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa. Pembelajaran masih terkonsentrasi pada pembentukan kognisi melalui pemberian informasi secara verbal, tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan wawasan dan nalar akan dimensi moral dari korupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan penerapan pendidikan Anti korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PKn), Pendidikan agama, dan bimbingan konseling sehingga tidak menambah mata pelajaran baru. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti untuk mengetahui dan mengalisis Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Di Sekolah Menengah Atas.

METODE

Tempat lokasi penelitian di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Surabaya Jawa Timur, Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu studi literatur. Tujuan

penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis serta menjelaskan fenomena dengan sedalam dalamnya melalui pengumpulan data. Metode tersebut bertujuan untuk memahami realitas dan makna dari peristiwa yang diketahui melalui hasil penelitian terdahulu, artikel maupun berita, jurnal juga memperkuat data yang dituliskan oleh peneliti. Sumber data berasal dari berbagai sumber yaitu, melalui guru-guru, murid, siswa sekolah menengah atas (SMA) yang berkaitan Pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Kota Surabaya. Pendekatan yang dipakai oleh peneliti dalam membuat artikel menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan kemudian menuangkannya ke dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk artikel.

HASIL

Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Menengah Atas.

Menurut (Jihan:2021) Pendidikan antikorupsi adalah sebuah gagasan kerangka pembelajaran tentang kemerosotan di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji, khususnya kekotoran dan meningkatkan perhatian publik untuk mengumpulkan pemahaman tentang risiko dan hasil yang akan diperoleh. dari perilaku yang merosot. Fokus utama dari instruksi memusuhi kekotoran batin adalah untuk menyajikan dan memberikan informasi tentang kekhasan peristiwa yang menggabungkan aturan, akibat dan sebab, misalnya terus memperluas keakraban dengan demonstrasi kriminal kehinaan. Untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi sangat berhasil melalui mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PPKn), maka pelatihan adalah suatu proses dalam bentuk karakter dan perubahan watak atau sifat, mental yang terjadi pada siswa sekolah menengah atas (SMA), dan melalui sekolah layak untuk diukur dengan baik, serta efektif tentang perilaku kemerosotan. (Depdiknas, 2009:3).

Tujuan pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu menyiapkan usia yang lebih muda untuk memiliki budaya sopan, kejujuran (*hostile to debasement*) melalui berbagai latihan di sekolah termasuk pelaksanaan administrasi berbasis sekolah, latihan pembelajaran, dan penyesuaian dengan tujuan agar setiap individu dapat menjauhinya. Pelatihan secara khusus, instruksi memusuhi kekotoran batin bermaksud untuk: (1) membentuk kehidupan sekolah sebagai komponen wilayah lokal melalui pembentukan iklim belajar dengan budaya kejujuran (melawan kehinaan), khususnya: asli, terlatih, cakap, berdedikasi, lugas, bebas, masuk akal, gagah berani, penuh perhatian, dan mulia (ketenangan). (2) memupuk kemampuan hati tenang, suara kecil mahasiswa melalui ruang emosi sebagai orang-orang yang menunjukkan kepedulian dan secara konsisten menjaga kualitas sosial sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air, dan di junjung oleh pemahaman publik yang kokoh. (3) mendorong mentalitas, praktik, kecenderungan yang mengagumkan sesuai dengan semua kualitas inklusif dan kebiasaan ketat cara hidup negara. (4) menancapkan jiwa otoritas yang ahli dan dapat diandalkan sebagai masa depan negara. (5) menyusun administrasi secara terbuka, lugas, cakap, dan cakap (Puskurbuk, 2012).

Prinsip pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn)

adalah pengembangan kehormatan sosial di antara semua individu sekolah, sehingga semua individu sekolah memiliki perhatian yang lebih tinggi, untuk secara konsisten bersikap lugas, terkendali, penuh perhatian, suka menolong, mendasar, bebas, masuk akal, gagah berani, dan peduli. Sebagai ciri dari pelatihan karakter, instruksi melawan kekotoran batin adalah sangat penting dalam kemajuan karakter oleh setiap orang atau siswa sekolah menengah atas (SMA) di kota Surabaya.

Langkah – Langkah dalam bentuk nilai antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Nilai Kejujuran.

Implementasi Pendidikan antikorupsi melalui pembiasaan nilai kejujuran merupakan usaha sadar untuk memberikan pencegahan dan pemahaman, serta memberantas antikorupsi, dan dapat menjadi tempat untuk penguatan nilai-nilai kejujuran yaitu, sopan, kedisiplinan, keterbukaan, dan tanggung jawab kepada peserta didik sejak dini. Keberadaan nilai kejujuran dapat memberikan kontribusi dalam membentuk tanggung jawab, secara mandiri, pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi (Alfurkan dan Marzuki : 2019). Berdasarkan (Wibowo:2012) Dalam bentuk penerapan Nilai kejujuran merupakan praktik Antikorupsi dengan cara dalam penguatan nilai kejujuran yang ditanamkan pada peserta didik yang ada di lingkungan sekolah. Nilai kejujuran harus ditanamkan dan di terapkan sejak usia dini karena nilai kejujuran untuk melatih para peserta didik untuk berbicara dan membuat apa adanya, tanpa menutupi dengan kebohongan.

Menurut (Nova Nadila. et, al : 2022) barang siapa saja dalam melakukan tidak jujur maka ia akan sulit untuk kembali dipercaya oleh orang lain. Dalam melakukan perilaku jujur perlu ditanamkan sejak usia dini di dalam diri peserta didik atau siswa supaya tidak membuat kesalahan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan bahkan orang lain, karena sering bertindak tidak jujur. Nilai kejujuran di sekolah dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam bentuk tindakan tidak melakukan kecurangan akademik seperti tidak mencontek saat ujian, tidak memalsukan tanda tangan dan nilai, tidak mencuri, tidak berbohong, dan lain sebagainya. Nilai kejujuran adalah sifat (keada'an) jujur, ketulusan hati, dan kelurusan hati (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 479).

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan dengan adanya nilai kejujuran dapat memlakukan pembiasaan dalam diri peserta didik di lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Pembiasaan bersikap jujur dan bertanggung jawab dapat melatih peserta didik disekolah selalu bersikap tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan serta berperilaku jujur sopan sesama teman, orang tua maupun ibu gurunya, Pembiasaan dalam melakukan tata tertib waktu ujian tidak menyotek, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi peserta didik untuk selalu berbuat jujur. Peserta didik di beri kepercayaan sepenuhnya dalam melakukan transaksi dengan jujur dan penuh tanggung jawab.

2. Nilai Kepedulian.

Selanjutnya menurut (Nova Nadila. et, al : 2022) Nilai Kepedulian dapat diwujudkan oleh peserta didik atau siswa siswi dalam beragam bentuk, diantaranya seperti berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau system pengelolaan sumber daya di sekolah, memantau kondisi infrastruktur lingkungan sekolah. Makna kepedulian berasal dari kata “peduli”, artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:841). Kepedulian bermakna berperilaku dan memperlakukan orang lain dengan baik serta di lingkungan sekitarnya, sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Peduli merupakan sifat yang dapat membuat segala

kesulitan dapat dihadapi, segala keadaan dapat ditanggung bersama, dan keterbatasan pun dapat dicarikan solusinya dengan baik.

3. Nilai Kemandirian

Selanjutnya nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk melaksanakan tugas secara mandiri serta melaksanakan ujian secara mandiri sesuai dengan tanggung jawab sebagai seorang peserta didik. Menurut (Widayati:2009), Aspek-Aspek Kemandirian yaitu: Pertama *mempertanggungjawabkan* adalah ke mampuan untuk menyelesaikan tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya, kemampuan menjelaskan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berfikir dan bertindak. *Kedua Otonomi*, ditunjukkan dengan mengerjakan tugas secara mandiri, yaitu suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan orang lain dan tidak tergantung pada orang lain dan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri. *Ketiga Inisiatif*, ditunjukkan dengan kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif. *Keempat Kontrol Diri*, kontrol diri yang kuat dan ditunjukkan dengan pengendalian Tindakan, secara emosi mampu mengatasi masalah dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian seorang remaja menurut Ali dan Asrori Gen atau keturunan orang tua, Pola asuh orang tua, Sistem pendidikan di lingkungan sekolah, Sistem kehidupan di masyarakat (Muhammad Ali,2006:110).

4. Nilai Kedisiplinan

Nilai Kedisiplinan siswa sangat penting, karena untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Sekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang baik. Meningkatkan kedisiplinan terhadap siswa sangat penting karena dilakukan oleh sekolah, mengingat sekolah merupakan tempat generasi penerus bangsa. Salah satu faktor yang membantu para peserta didik atau siswa untuk meraih sukses dimasa depan yaitu dengan kedisiplinan. Para siswa dalam melakukan kegiatan belajar disekolah tidak terlepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang telah diberlakukan disekolah dan setiap peserta didik atau siswa harus berperilaku sesuai dengan tata tertib yang ada dilingkungan sekolah. Menurut Sumarsono (2010: 67) kedisiplinan di sekolah sangat erat berhubungan dengan kerajinan peserta didik dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan tersebut seperti mencakup seluruh kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib disekolah.

5. Nilai Tanggung Jawab

Nilai Tanggung jawab adalah Sikap atau perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan pada nilai yang berlaku di masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Berdasarkan Kamus umum Bahasa Indonesia, Nilai Tanggungjawab ialah Kewajiban yang di tanggung seseorang Individu termasuk menanggung akibat, Contohnya Tanggung jawab seperti Peserta didik atau siswa wajib belajar demi memenuhi kewajibannya, Lulus tepat waktu dengan nilai bagus, serta mengerjakan tugas yang di berikan oleh bapak atau ibu guru, dan menjaga amanah serta amanahnya di berikan kepadanya. Menurut (Mustari 2011:51-52) menyebutkan bahwa yang dimaksud kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas belajar/bekerja dengan sebaik-baiknya. Menurut (Daryanto, 2013 : 142) menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri

sendiri, lingkungan, masyarakat, (alam, sosial,&budaya). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan nilai tanggung jawab diwujudkan dalam bentuk belajar yang sungguh-sungguh, dan mengerjakan tugas tepat waktu dengan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri terutama yang ditanamkan pada peserta didik atau siswa siswi disekolahan.

6. Nilai Kesederhanaan

Nilai kesederhana'an dapat juga di pahami dengan arti dari sikap utuh cara berpikir, sopan santun, bertutur kata sesama orang lain, atau orang yang lebih tua, dan bertindak tulus yang dapat di tanamkan sejak usia dini, sehingga dapat menumbuhkan jiwa yang mampu memudahkan mengambil keputusan dengan paradigma dari realitas yang ada. Menurut (Yenik Pujowati:2021) Nilai sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak usia dini, sejak masuk sekolah dasar sampai ke tingkat jejang perguruan tinggi, maupun dikembangkan pada peserta didik mengenyam masa Pendidikan di lingkungan sekolahan. Misalnya bapak atau ibu guru mengajarkan siswa nya tidak berlebih-lebihan, tidak sombong (Pamer kekayaan orang tua) dengan adanya dalam segala hal. Selain itu guru juga menjelaskan tentang pengaruh Globalisasi dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya terpengaruhnya alat-alat elektronik yang semakin canggih. Menurut (Darmadi, Hamid, 2014:117) mengungkapkan sederhana adalah kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuan. Sederhana dapat pula berarti tidak berlebihan atau tidak mengandung unsur kemewahan.

7. Nilai Keadilan

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Nilai keadilan dapat di kembangkan oleh peserta didik atau siswa diantaranya melalui bentuk yang memberikan saran perbaikan dan semangat pada temannya yang tidak berprestasi, tidak memilih teman dalam bergaul berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Keadilan berasal dari kata adil, artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; berpihak kepada yang benar, Pendidikan Antikorupsi berpegang pada kebenaran; sepatutnya, tidak sewenang-wenang (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 8). Kata keadilan juga memiliki makna yang beragam. Cephalus, seorang hartawan terkemuka Athena, memaknai keadilan sebagai bersikap fair dan jujur dalam membuat kesepakatan (Rasuanto, 2005: 8).

Peran Guru Dalam Implementasi Nilai-Nilai Antikorupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Nilai – Nilai antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegara'an (PPKn) yaitu untuk mengembangkan kapasitas diri serta merupakan proses *Character Building* guna membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuh kembangkan potensi peserta didik. Selain itu Pendidikan kewarganegaraan (PPKn) yaitu untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia ini untuk mencangkup banyak pengertian salah satunya seperti sikap, karakter antikorupsi, salah satunya perhatian pemerintahan dalam usaha kegiatan untuk membentuk sikap antikorupsi melalui motivasi-motivasi dan sharing pengalaman Bersama bapak ibu guru disekolahan dengan di keluarkan Kurikulum terkait Mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (Sri Nawarti : 2011).

Berdasarkan alinea di atas tersebut, di dapatkan peneliti dari informan guru PPKn bapak

Agus Sulaiman Peran guru dalam menanamkan nilai-nilai melalui antikorupsi kepada peserta didik atau siswa siswi di SMA Kota Surabaya, beliau menekankan bahwa guru adalah peran utama, karena dalam lembar rancangan kegiatan pembelajaran kurikulum jelas dikatakan bahwa guru diwajibkan melakukan motivasi-motivasi berbagai pengalaman kepada peserta didik atau siswa siswi di sekolah menengah atas (SMA) terkait tentang karakter kebangsaan termuat nilai-nilai antikorupsi. Menurut bapak putu Pendidikan Pancasila dan kewarganeraan sangatlah berperan bagi pertumbuhan moral dan ahklak peserta didik yang baik di sekolah menengah atas (SMA) Misalnya; siswa siswi ikut di ajarkan untuk saling menghargai, menghormati, jujur dan adil dalam semua segi kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya hasil penelitian ini juga mendapatkan informan dari peserta didik atau siswa bertanya mengenai apakah value-value antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan kewarganeraan (PPKn) telah di sampaikan kepada peserta didik atau siswa siswi di sekolah menengah atas (SMA) dengan baik. Peserta didik telah menyampaikan tentang guru yang mengampu mata pelajaran Pendidikan kewarganeraan telah mencontohkan dan memberikan pengertian terkait sikap-sikap positif dapat menjadi sikap tauladan yang baik bagi diri sendiri maupun peserta didik. Selanjutnya peserta didik juga merasakan dorongan-dorongan guru kepada mereka serta senantiasa untuk mengamalkan nilai-nilai antikorupsi supaya mereka lebih terbiasa dan menjadi peserta didik yang memiliki kejujuran, sikap bertanggung jawaban, kerja keras, kesederhanaan serta ahklan yang baik, moral dan mempunyai tata nilai manusia yang baik.

Berdasarkan Urian peneltian diatas, bahwa kedudukan atau peran guru dalam menanamkan value antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan kewarganeraan (PPKn) di sekolah menengah atas (SMA) terhadap peserta didik sangatlah relavan, dengan mencontohkan terkait penerapan kepada diri sendiri dan peserta didik di SMA serta memberikan motivasi buat kedepannya. Peserta didik atau siswa siswi yang terlibat dalam setiap kegiatan yang mengadung nilai-nilai antikorupsi dapat memahami dan menambahkan pengetahuan tentang sikap antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganeraan secara tidak langsung dapat di Kembangan dan di Implementasikan dalam bentuk kegiatan sehari-hari, baik di lingkungan sekolahan, di kelas maupun di lingkungan luar kelas atau sekolahan.

KESIMPULAN

Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu

- 1) Peran guru mengajarkan peserta didik terkait tentang nilai-nilai antikorpsi melalui mata pelajaran Pendidikan kewarganeraan (PPKn). Dengan cara guru memberikan pengetahuan terkait nilai-nilai antikorupsi seperti; dengan cara guru memberikan Latihan, kecerdasan pikiran dengan metode pembelajaran secara mandiri serta berkelompok, peserta didik untuk menaati aturan, bersikap jujur, serta bekerja keras, Dengan cara guru memberikan arahan untuk bersikap sederhana, serta memiliki rasa percaya diri. Selanjutnya peran guru menilai dan mengevaluasi peserta didik terkait nilai-nilai antikorupsi serta memiliki catatan kecil terkait kehadiran siswa siswi dikelas.
- 2) Implementasi antikorupsi yang di tanamkan oleh guru PPKn kepada peserta didik yaitu memiliki rasa tanggung jawab, bersikap jujur dan Amanah, tidak berlaku curang atau serakah, Rajin, sabar dan mau berkerja keras serta gaya hidup sederhana, terbiasa hidup apa adanya, hidup hemat dan dekat dengan tuhan yang maha esa, serta keberanian dan keadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Alfurkan dan Marzuki, 2019. Penguatan Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 4, Nomor 2, juni 2019. Halaman 221-231 ISSN:2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e), <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Budimansyah, D. 2008. Revitalisasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui praktik belajar kewarganegaraan (project citizen). *Civicus*, 1(2), 179–189.
- Daryanto, (2013). Inovasi Pembelajaran Efektif. Bandung: Yrma Widya.
- Darmadi, Hamid. 2014. Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 2009. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Surabaya: Dinas Pendidikan Pendidikan. Provinsi Jawa Timur.
- Harmanto, 2012. Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Volume 19, Nomor 2, Oktober 2012.
- Sumarsono. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramdia Pustaka Utama.
- Sutrisno, 2017. Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis *project citizen* di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Civics* Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017.
- Sri Narwanti. 2011. Pendidikan Karakter: Pengintegrasian 18 Nilai Pembentukan Karakter dalam Mata Pelajaran. Yogyakarta: Familia.
- Lili Halimah, et al, 2021. Upaya Guru dan Orang Tua dalam Membangun Karakter Mandiri Siswa Autis di Sekolah Luar Biasa Negeri A Kota Cimahi. *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian* Vol. 2, No. 3, Sep 2021, hal. 41-63.
- Jihan Humaira, et al, 2021. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021. Halaman 8612-8620.
- Muhammad Ali & Muhammad Asrori. Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Bumi Aksara. 2006..
- Mustari Mohamad. 2011. Nilai Karakter. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Nova Nadila, 2022. Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkayang. Vol.2 No.2 Agustus 2022 *Character and Civic: Jurnal Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan* ISSN: 2808-294X.
- Rasunto, B. (2005). Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern. Jakarta: Gramedia.
- Wibowo, A. 2012. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widayati. 2019. Hubungan Antara Kemandirian Diri dengan Motivasi Berwirausaha Mahasiswa Anggota UKM Kopma UNY. Yogyakarta: UNY.
- Yenik Pujowati. 2021. Dinamika Kebijakan Pembelajaran Daring di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Pamator*. Volume 14 No 2, Oktober 2021, Hlm 158-164 <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>